

**Kiat Praktis
Identifikasi, Dokumentasi dan
Promosi Praktik Cerdas**

Tim Penyunting:
Lily Yulianti Farid
Mila Shwaiko
Victoria Ngantung

**Kiat Praktis Identifikasi, Dokumentasi dan
Promosi Praktik Cerdas**

Diterbitkan oleh
Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
Jl. DR. Soetomo no. 26
Makassar 90113 Sulawesi Selatan
Telp. 0411-365020-22

atas dukungan
Decentralization Support Facilities (DSF)

Dicetak oleh
Nala Cipta Litera

Narasumber:
Piet Soeprijadi
Matsui Kasuhiza
Ubaidillah
Judy Ramdojo

Tim Penyunting:
Lily Yulianti Farid
Mila Shwaiko
Victoria Ngantung

Desain Sampul/Layout:
Muhary Wahyu Nurba

Sambutan

Direktur Eksekutif BaKTI

Setiap kali Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) menerbitkan buku, dokumen, laporan, buletin atau produk publikasi lainnya, saat itu juga kami memperbaharui harapan pada penyebaran pengetahuan dan informasi pembangunan di kawasan ini. Kami senantiasa percaya bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan dapat diatasi bukan hanya melalui kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya, melainkan juga melalui upaya terus menerus untuk membuka akses guna mendapatkan pengetahuan dan informasi. Dan, BaKTI yang memang memfokuskan diri pada peningkatan efektivitas pembangunan melalui pertukaran informasi dan kegiatan untuk berbagi sumber-sumber pembelajaran, senantiasa mengembangkan berbagai upaya untuk mendukung dokumentasi, publikasi dan promosi inisiatif dan terobosan yang dilakukan para pelaku pembangunan.

Sepanjang tahun 2009, BaKTI dengan dukungan sejumlah pihak, mengidentifikasi Praktik Cerdas (*Smart Practice*) dalam berbagai bidang pembangunan. Istilah Praktik Cerdas mulai diperkenalkan di BaKTINEWS pada tahun 2006. Kami mengadopsinya dari Ilmu Manajemen yang menamakan terobosan inovatif yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat sebagai kegiatan yang *smart*. Langkah identifikasi Praktik Cerdas ini kemudian diikuti dengan upaya dokumentasi dan diseminasi secara berkelanjutan, karena kami hendak terus menggulirkan kisah inovatif dan inspiratif dari dan untuk para pelaku pembangunan di berbagai tempat. Tujuannya, agar agar menjadi sumber pengetahuan, referensi, maupun rujukan untuk melakukan replikasi di daerah yang menghadapi tantangan pembangunan yang serupa.

Penerbitan buku *Kiat Praktis Identifikasi, Dokumentasi dan Promosi Praktik Cerdas* adalah wujud komitmen kami untuk membuka akses informasi bagi pelaku pembangunan di mana pun. Tidak hanya memuat Praktik Cerdas terpilih, tapi juga menyajikan kiat mengidentifikasi dan cara-cara untuk mempromosikannya.

Kami mengucapkan terima kasih setulusnya kepada Manajer Program *Decentralization Support Facilities* (DSF) Peter Blunt beserta seluruh staf yang selama ini menjadi mitra BaKTI dalam menjalankan berbagai kegiatan. Buku ini juga menjadi istimewa, karena penerbitannya sekaligus menandai berakhirnya kemitraan tersebut. Sebuah kerjasama yang diakhiri dengan sungguh manis: penerbitan buku yang menjadi semacam prasasti dan sumber pengetahuan yang abadi dan akan terus mendatangkan manfaat.

Buku ini juga hadir di tengah persiapan kami untuk beroperasi sebagai yayasan yang mandiri. Tentunya, sebagai lembaga yang independen, kami membuka kesempatan yang

lebih luas kepada semua pihak yang memiliki perhatian dan komitmen yang sejalan. Bukan hanya dalam identifikasi, dokumentasi dan promosi Praktik Cerdas, tapi dalam seluruh upaya memajukan kawasan ini.

Akhirnya, kami mengharapkan kehadiran buku ini dapat membantu para pelaku pembangunan untuk memulai inisiatif untuk mengidentifikasi, mendokumentasi dan mempromosikan Praktik Cerdas.

Makassar, Desember 2009

Caroline Tupamahu
Direktur Eksekutif

Pengantar

Manfaat dan tantangan merupakan bagian tak terpisahkan dalam kegiatan pembangunan. Ibarat dua sisi mata uang, di mana pun proses pembangunan dijalankan, kedua hal ini senantiasa hadir bersamaan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan giat di kawasan timur Indonesia pun mengalami hal yang sama. Masyarakat di kawasan ini menerima manfaat dari hasil pembangunan, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan.

Untuk menjawab tantangan demi tantangan perlu diciptakan terobosan dan inovasi. Dan tentu saja, kepekaan serta ide kreatif yang cerdas menjadi syarat penting bagi pelaku pembangunan dalam memikirkan dan mewujudkan berbagai terobosan dan inovasi tersebut.

Pengalaman mengajarkan bahwa ide untuk melakukan terobosan dan inovasi, utamanya berasal dari proses belajar secara terus menerus, yang membuat pelaku pembangunan semakin mengenali ragam persoalan yang dihadapi atau terinspirasi dari upaya yang telah dilakukan di tempat lain

yang memiliki tantangan serupa. Sebagai contoh, penyediaan sepeda motor bagi petugas kesehatan di Kabupaten Flores Timur yang dirancang program Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS), terinspirasi dari kegiatan *Riders for Health* di Inggris yang menyediakan sepeda motor bagi petugas kesehatan di Afrika. Replikasi yang disertai dengan sejumlah penyesuaian dan inovasi tambahan sesuai dengan kondisi lokal di Kabupaten Flores Timur, membuat program ini berhasil meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Di Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), gagasan inovatif yang lahir dari para pelaku pembangunan diistilahkan sebagai praktik cerdas (*smart practice*). Bagi BaKTI, salah satu upaya mendorong efektivitas pembangunan adalah dengan mengambil peran aktif untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, mempromosikan praktik cerdas di kawasan timur Indonesia.

Praktik cerdas belakangan ini memang semakin mendapat tempat sebagai model pembangunan sosial yang berdampak lebih besar dalam membangkitkan antusiasme masyarakat untuk menularkan gagasan inovatif. Istilah ini dinilai lebih positif dibandingkan misalnya dengan istilah Praktik Terbaik (*Best Practice*), yang lebih dahulu dikenal. Alasannya, kata “cerdas” dalam istilah ini merujuk pada terobosan yang membawa dampak signifikan, dengan indikator penilaian keberhasilan yang tidak terlalu rumit, serta memberi penghargaan pada proses perumusan ide dan peluang untuk direplikasi dengan penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Buku panduan dokumentasi dan promosi praktik cerdas ini hadir sebagai bagian dari upaya BaKTI, di mana sepanjang tahun 2009, dengan bantuan berbagai pihak kami aktif

“berburu” praktik cerdas di 12 provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Semangat yang mendasari upaya ini adalah untuk mengabarkan dan menyebarkan pendekatan yang unik, inovatif dan kreatif dari berbagai daerah, sehingga menjadi sumber pembelajaran bersama.

Penerbitan buku ini didahului oleh lokakarya yang diadakan pada 19-20 Mei 2009 di Makassar, dengan mengundang limapuluh pelaku pembangunan dari 12 provinsi untuk memahami pentingnya upaya dokumentasi dan promosi praktik cerdas, serta betapa signifikannya peran menyebarkan inovasi pembangunan, meski cakupan dan dampaknya bersifat lokal. Enam praktik cerdas kami tampilkan di buku ini sebagai contoh, yang dipilih oleh peserta lokakarya dan tim penyusun buku.

Buku ini juga mencerminkan langkah konkret yang dilakukan BaKTI sebagai fasilitator untuk meningkatkan kerjasama dan mengembangkan jejaring para pelaku pembangunan, yang pada gilirannya akan memperluas akses informasi dan pengetahuan. Sebagai lembaga yang memfokuskan diri pada pengelolaan pengetahuan pembangunan di KTI, BaKTI senantiasa berupaya mempublikasikan berbagai laporan, dokumen dan buku panduan yang menjadi sumber pembelajaran bersama bagi para pelaku pembangunan.

Penerbitan buku ini terwujud di tengah persiapan BaKTI beroperasi sebagai yayasan mulai Januari 2010. Sebagai yayasan, BaKTI merupakan transformasi dari program multi donor Support Office for Eastern Indonesia (SofEI) sejak 2004. Kami berharap perubahan ini akan membuat BaKTI berkiprah secara lebih efektif dalam menjawab tantangan kesenjangan akses informasi dan pertukaran pengetahuan, yang diyakini sebagai salah satu tantangan pembangunan di KTI.

Tentu saja, penerbitan buku ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan serta kerjasama dari Decentralization Support Facility (DSF) Jakarta dan Nala Cipta Litera Makassar.

Akhirnya, kami berharap buku panduan ini menjadi inspirasi dan membantu para pelaku pembangunan untuk mendokumentasi dan mempromosikan praktik cerdas di daerah mereka masing-masing. (*)

Makassar, Desember 2009

Tim Penyusun

Lily Yulianti Farid

Mila Shwaiko

Victoria Ngantung

Daftar Isi

Sambutan Direktur Eksekutif BaKTI	iii
Pengantar	vii
Apa itu Praktik Cerdas?	1
Mendokumentasikan Praktik Cerdas	5
Mempromosikan Praktik Cerdas	11
Praktik Cerdas Perempuan Sultra, Dari Getah Pepaya Hingga Persemaian Benih Jati	29
Memanfaatkan Pemetaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kampung	33
“Bank Ikan” untuk Melestarikan Sumber Daya Pesisir	39
Dengan Motor yang Terawat, Petugas Kesehatan Selalu Siaga	47
Belajar Membaca dan Menulis di Sekolah <i>Lipu</i>	59
Media Lokal Se-KTI	65
Media Nasional	67

Apa itu Praktik Cerdas?

Praktik Cerdas (*Smart Practice*) memang istilah yang cukup baru dalam pembahasan isu-isu pembangunan di kawasan timur Indonesia. Secara sederhana Praktik Cerdas dapat dikatakan sebagai sebuah upaya atau kegiatan yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan tertentu yang dihadapi oleh sebuah komunitas di daerah tertentu. Untuk dapat dikategorikan sebagai Praktik Cerdas, sebuah kegiatan setidaknya memenuhi kriteria berikut:

- **Inovatif**

Merupakan inisiatif yang baru atau bisa juga merupakan hasil replikasi dari daerah lain tetapi telah disesuaikan dengan kondisi setempat.

- **Partisipatif**

Setidaknya melibatkan dua pemangku kepentingan tingkat lokal dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

- **Berlanjut**

Kegiatan telah dilakukan setidaknya dua tahun dan masih berlangsung saat ini disertai rencana untuk dilanjutkan

di waktu yang akan datang. Kegiatan juga bisa dapat terus berjalan dengan pendanaan mandiri dari masyarakat.

- **Akuntabel**

Kegiatan bersifat akuntabel dan transparan bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat, tanpa terkecuali.

- **Berpihak pada rakyat miskin dan berkeadilan jender**

Kegiatan dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin serta berdampak dan dikerjakan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

- **Dampak nyata**

Ada perubahan positif yang nyata terlihat atau dialami oleh masyarakat penerima manfaat.

Praktik Cerdas dan Praktik Terbaik

Seringkali Praktik Cerdas (*Smart Practices*) dianggap sama dengan Praktik Terbaik (*Best Practice*) karena istilah ini relatif baru bagi masyarakat umum. Dalam berbagai pembahasan masalah pembangunan, istilah Praktik Terbaik memang lebih sering digunakan. Namun berbeda dengan Praktik Terbaik yang memerlukan kriteria dan indikator yang cukup banyak dan perlu melalui rangkaian proses penyaringan dan pembobotan untuk menentukan yang terbaik, Praktik Cerdas berfokus pada solusi masalah, kekuatan yang dimiliki dan aspek pendukung lainnya untuk menginspirasi aksi positif dan lahirnya inovasi. Dalam penentuan Praktik Cerdas, tidak ada kegiatan yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain.

Praktik Cerdas dan Kisah Sukses

Berfokus pada keberhasilan, Kisah Sukses (*Success Story*) sering dianggap sama dengan Praktik Cerdas. Sebuah kisah tentang keberhasilan sebuah kegiatan dalam menjawab sebuah tantangan di suatu tempat, belum dapat dikatakan

sebagai sebuah Praktik Cerdas karena belum tentu dapat direplikasi di tempat lain. Sebuah kegiatan dapat saja berhasil karena kepakaran seseorang dalam bidang tertentu atau karena kemampuan seseorang dalam menggerakkan sekelompok orang (*one man show*). Tanpa kepakaran atau kepemimpinan yang kuat dari pelaku utama ini, belum tentu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan karenanya tidak ada pola kegiatan yang dapat dicontoh oleh kelompok masyarakat di tempat lain.

Praktik Cerdas dan Teknologi Tepat Guna

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, etika, budaya, sosial, dan ekonomi dari komunitas pengguna. Salah satu Praktik Cerdas dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Batanguru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Selatan. Masyarakat desa Batanguru, tidak hanya memakai listrik yang bersumber dari tenaga mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka juga membuat turbin pembangkit tenaga listrik dan menjualnya ke desa-desa lain di sekitar Batanguru.

Praktik Cerdas tentu saja mempunyai cakupan yang lebih luas dari sekedar pemanfaatan teknologi tepat guna. Tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada upaya maupun aturan yang berlaku pada sebuah kelompok tertentu. Praktik Cerdas dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang telah berlaku dalam kelembagaan masyarakat. Misalnya Sasi, sebuah aturan adat yang berlaku di Maluku dan Papua yang mengatur waktu untuk berburu dan memanen, juga merupakan sebuah Praktik Cerdas.

Mendokumentasikan Praktik Cerdas

Memahami sebuah Praktik Cerdas akan membantu kelompok masyarakat untuk mengefektifkan proses pembelajaran (waktu, daya dan biaya) dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi. Memahami Praktik Cerdas juga dapat membantu kelompok masyarakat untuk memutuskan apakah akan menggunakannya sebagai sebuah pedoman, model atau sekedar referensi. Untuk dapat memahami sebuah Praktik Cerdas, diperlukan dokumen yang memuat berbagai informasi penting tentang Praktik Cerdas tersebut. Dengan demikian mendokumentasikan sebuah Praktik Cerdas menjadi penting untuk dilakukan agar Praktik Cerdas dapat dipahami dengan baik dan direplikasikan.

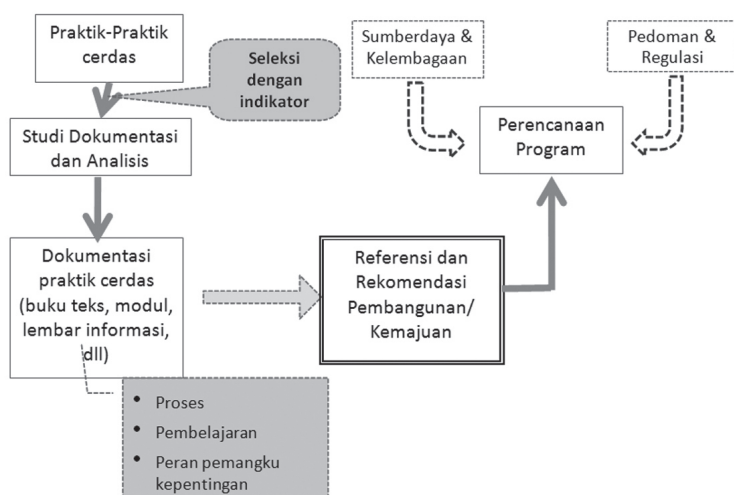
Mengapa perlu mendokumentasikan praktik cerdas?

- Praktik Cerdas merupakan pengalaman nyata di lapangan yang menunjukkan pemanfaatan sumberdaya dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

- Pengalaman sebagai proses yang mengandung pembelajaran dan dapat menjadi sumber referensi yang nyata.
- Praktik Cerdas berpeluang untuk direplikasi, dengan atau tanpa modifikasi.

Untuk menjadikan Praktik Cerdas sebagai referensi dibutuhkan pendokumentasian Praktik Cerdas sesuai dengan kerangka pembangunan atau proses perubahan. Prosesnya dapat dilihat pada badan di bawah ini.

Dari Praktik Cerdas ke Program Kemajuan



Bentuk Dokumentasi Praktik Cerdas

Bentuk	Fungsi	Kelebihan/Kekurangan
Brosur/Buletin	■ Informasi keberadaan PC ■ Gambaran singkat PC untuk pengenalan lebih lanjut	(+) Penyebaran bisa lebih luas (+) Dapat didukung dengan gambar (-) Informasi disajikan serba singkat
Buku Teks	■ Media dokumentasi PC ■ Referensi bagi perencanaan pembangunan ■ Informasi detail kepada pemerintah/pemangku kepentingan	(+) Informasi lebih banyak dan detail (+) Memberi gambaran proses secara lebih lengkap (-) Penyebaran lebih terbatas
Dokumentasi Audio Visual (Film Dokumenter)	■ Menarik minat lebih lanjut untuk mempelajari PC ■ Sarana berbagi pengetahuan yang menarik dan mudah dipahami	(+) Visualisasi lebih jelas (sumber-daya, lokasi, interaksi) (-) Biaya produksi dokumentasi lebih besar
Artikel (Koran, Majalah, Situs Online)	■ Media dokumentasi PC ■ Referensi bagi perencanaan pembangunan ■ Informasi awal kepada pemerintah/pemangku kepentingan	(+) Informasi umum dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti khalayak luas (+) Penyebaran lebih luas (-) Informasi terbatas
Modul/Manual	■ Referensi penerapan untuk kegiatan lebih luas dan beragam ■ Panduan umum bagi kegiatan pembangunan daerah berdasarkan PC	(+) Sudah merupakan sintesa dari beberapa PC dan penyusunannya dalam format pedoman (-) Tidak menggambarkan satu PC secara utuh

Pencarian Fakta

- Identifikasi fakta
 - ♦ Kondisi geografis/lingkungan sekitar praktik
 - ♦ Kultur/tradisi yang mendukung/menghambat praktik
 - ♦ Sejarah masyarakat (peristiwa-peristiwa penting, masalah yang pernah dialami)

Informasi yang perlu diketahui untuk didokumentasikan

- Motivasi dan latar belakang munculnya gagasan Praktik Cerdas
 - ♦ Mengapa muncul gagasan?
- Bersumber dari keinginan masyarakat
 - ♦ Apakah gagasan muncul karena adanya keinginan kuat di masyarakat?

- Kepemimpinan lokal yang mendukung munculnya gagasan Praktik Cerdas
 - ♦ Apakah kepemimpinan lokal mendukung munculnya gagasan-gagasan cemerlang di masyarakat?
- Perencanaan dan Strategi
 - ♦ Siapa yang memulai gagasan Praktik Cerdas
 - ♦ Siapa saja yang mendukung gagasan yang muncul
 - ♦ Keterlibatan masyarakat dalam gagasan awal/perencanaan awal
 - ♦ Bentuk hambatan yang muncul pada tahap perencanaan/mengembangkan gagasan.
 - ♦ Usaha untuk mengatasi gagasan tersebut
- Mobilisasi Sumberdaya
 - ♦ Sumberdaya lokal dan luar yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan-identifikasi sumberdaya potensial yang digunakan
 - ♦ Proses mobilisasi sumberdaya dan kunci suksesnya
 - ♦ Keterlibatan masyarakat dalam mobilisasi sumberdaya
 - ♦ Hambatan yang dialami dan bagaimana mengatasinya
- Implementasi dan Perkembangan
 - ♦ Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam kegiatan
 - ♦ Ketersediaan “ahli” dalam pelaksanaan kegiatan
 - ♦ Perkembangan yang konkrit dan penting dalam kegiatan
 - ♦ Manfaat dan nilai plus kegiatan
 - Peningkatan kualitas hidup?
 - Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja?
 - Efisiensi penggunaan sumberdaya lokal?
 - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan?
 - Peningkatan kualitas infrastruktur lokal?
 - ♦ Perubahan yang signifikan di komunitas/masyarakat

- **Pemantauan dan Evaluasi**
 - ♦ Usaha yang dilakukan untuk memantau kegiatan
 - ♦ Inovasi yang dilakukan untuk memperluas kegiatan
 - ♦ Keberlanjutan kegiatan
 - ♦ Usaha yang dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan
 - ♦ Dukungan bagi keberlanjutan (kebijakan, pendanaan, upaya)

Elemen kunci dokumentasi Praktik Cerdas

- Latar belakang munculnya gagasan
- Inisiator dan Inovator gagasan
- Keunikan dari gagasan yang disampaikan
- Pengembangan gagasan dan implementasi kegiatan berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan keterlibatan stakeholder
- Proses mobilisasi sumberdaya dan strategi yang digunakannya
- Keterlibatan masyarakat/komunitas dan
- Dukungan stakeholder
- Benefit dari kegiatan bagi masyarakat/komunitas
- Pengembangan kegiatan untuk keberlanjutan dan keterlibatan stakeholder

Dari mana pembelajaran diambil?

Tahapan praktik dimana lesson learned dapat diambil:

- **Inisiatif awal dan pengembangan gagasan**
 - ♦ Kondisi-kondisi yang dapat memunculkan ide cerdas
 - ♦ Strategi mengembangkan ide cerdas menjadi aksi
- **Partisipasi stakeholder**
 - ♦ Peran yang tepat dari masing-masing stakeholder
 - ♦ Kerjasama antar stakeholder

- Mobilisasi sumberdaya, termasuk mengorganisasikan keterlibatan masyarakat
- Perluasan dan keberlanjutan

Pertimbangan Penting dalam Mendokumentasikan Praktik Cerdas

- ❖ Gunakan bahasa dan alur kalimat yang menarik dan mudah dipahami
- ❖ Dukungan visual (gambar) sangat penting
- ❖ Harus menunjukkan kekuatan dari Praktik Cerdas yang dapat mendorong terjadinya replikasi atau penyebaran gagasan
- ❖ Mencantumkan contact person dari Praktik Cerdas agar pembaca yang berminat dapat menghubunginya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
- ❖ Mendokumentasikan Praktik Cerdas tidak menjamin Praktik Cerdas tersebut akan dapat direplikasikan dengan mudah ditempat lain. Dokumen Praktik Cerdas sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang tepat mengenai suatu Praktik Cerdas sehingga memudahkan dalam memulai proses replikasi. Namun masih terdapat banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan replikasi praktik cerdas.
- ❖ Fungsi dokumen praktik cerdas lebih sebagai sumber pengetahuan, memberi inspirasi, membangkitkan semangat, dan pedoman umum dalam melakukan replikasi
- ❖ Bagaimana proses transfer akan dilakukan harus diperhatikan saat mendokumentasikan Praktik Cerdas
- ❖ Lebih baik jika dapat terus meng *up date* kondisi/ perkembangan dari Praktik Cerdas yang didokumentasikan

Mempromosikan Praktik Cerdas

Promosi praktik cerdas dapat dilakukan melalui publikasi terbatas seperti buletin yang diterbitkan khusus oleh suatu lembaga, media massa, jejaring sosial atau media sosial berbasis internet dan juga melalui kegiatan yang dirancang khusus, seperti forum, seminar atau lokakarya.

Publikasi Terbatas

Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau donor internasional yang menerbitkan publikasi terbatas pada umumnya memberi ruang pemberitaan yang besar bagi inovasi yang dilakukan kelompok masyarakat. Publikasi terbatas umumnya berbentuk buletin atau laporan yang diterbitkan berkala, diedarkan secara terbatas dan bersifat cuma-cuma. Untuk kebutuhan promosi dan diseminasi informasi, komunitas atau individu yang memiliki informasi praktik cerdas dapat mengirimkan artikel dan foto kegiatan langsung ke pengelola publikasi terbatas.

BaKTI News

[illegible]

<http://nusataniterpadu.wordpress.com>

[Beranda](#)
[Profil Program](#)
[Alur Kegiatan](#)
[Pelaku](#)
[Taut/Link](#)
[Unduh/Download](#)
[Buku Tamu](#)






PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN
SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
Provinsi Nusa Tenggara Timur

2 Desember 2009

Post by Administrator under Kabar, Pemantauan Partisipatif, Umum

[Leave a Comment](#)

Hari menjelang sore, kesibukan nampak seperti biasa kala sebuah aktivitas akan selesai ditutup! Partisipan Pelatihan Pelaku Kader dan Pendamping Lokal PNPM Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Ngada lalu pulang menjelang penutupan acara pelatihan yang dilakukan bulan Nopember 2009 kali lalu. Sibuk dengan administrasi uang transport, takut jika nanti tak kabagian dan pada akhirnya bencana niscaya terjadi ketika Istri atau Suami bertanya. Mungkin bagi sebagian kita, menginap di hotel adalah hal yang biasa, namun tidak bagi sebagian besar pelaku Kader Desa di Kabupaten Ngada.....meninggalkan beberapa hari untuk mengikuti Pelatihan di kabupaten dan berangkat dari Desa yang nun jauh memang tak biasa dan dipastikan menimbulkan pertanyaan ini itu dari keluarga. Beberapa Nona ketika pamit pada keluarga untuk nginap dan tinggal di hotel saja sudah ada yang panik, tak sopan ujur keluarga tua mereka. Namun toh ketika diingatkan mereka menginap karena ada kegiatan Pelatihan, apalagi untuk kegiatan PNPm, ijipun dengan mudah diberikan!

Mengisi ruang kosong pada sore itu, kami sebagai fasilitator pelatihan memang biasa dengan membagikan selemar angket pooling, setidaknya membuat sebagian besar Partisipan duduk manis, disibukkan dengan melingkari dan mengayunkan pena mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam lembar angket yang berisi tentang pendapat mereka mengenai layanan jasa pengembang agribisnis. Waktu berjalan sekitar 45 Menit, satu per satu anekek diserahkan pada fasilitator, dan kemudian acara

[RSS - Posts](#)

Statistik Tamu

> 11,574 Hit counter

Cari

Sejenak Bujuk

'Tidak boleh dilupakan bahwa kerentanan kawasan pedesaan memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup para petani kecil dan keluarga mereka', Paus Benediktus XVI

Kategori

Pilih Kategori

Komentar Pengunjung



salamain di Cerdasan Masyarakat di Desa...
Indah di Aloragora, Ind...

Media Massa

Mempromosikan praktik cerdas melalui media massa baik cetak (surat kabar, majalah, tabloid), elektronik (radio dan televisi) maupun elektronik (media berbasis internet), memiliki keistimewaan berupa daya jangkauan yang luas. Berikut ini tiga langkah yang dapat ditempuh untuk memberitakan praktik cerdas:

1. Mengirim siaran pers

Yang dimaksud siaran pers adalah lembar informasi yang disusun dan dikirimkan kepada redaksi media cetak, elektronik dan online. Isi siaran pers mencakup kegiatan yang hendak diberitakan dengan mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan media. Agar siaran pers yang dikirim menarik perhatian redaksi, hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pilih judul yang singkat, mencerminkan inti kegiatan dan menarik.
- b. Gunakan kalimat yang lugas, atraktif, efektif dan jelas dengan memperhatikan panjang isi siaran pers (jumlah kata 400-700 kata). Redaksi media massa sangat terbantu bila siaran pers ditulis dengan gaya penulisan jurnalistik
- c. Sertakan seluruh informasi penting yang mencakup nama kegiatan, penjelasan latar belakang, proses, skala, pencapaian, dampak dan tantangan serta pelaksana dan penanggung jawab kegiatan.
- d. Sertakan foto-foto pendukung yang memiliki nilai jurnalistik.
- e. Cantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi bila jurnalis/redaktur membutuhkan informasi lebih jauh.

Contoh Siaran Pers:

***Habis Gelap Terbitlah Listrik Mandiri
- Mikrohidro Batang Uru, Kabupaten Mamasa
di Tengah Krisis Energi:
“Desa Kami Berencana Jual Listrik ke PLN”***

Di tengah krisis listrik yang melanda banyak daerah di tanah air, listrik mandiri masyarakat di Desa Batang Uru menjadi inspirasi yang layak diapresiasi. Inisiatif mikrohidro pertama dijalankan di desa ini tahun 1993, namun belum sampai memenuhi kebutuhan energi desa ini. Setelah melewati proses panjang, dengan sedikit dukungan dari pihak lain, tahun 2008 Desa Batang Uru memperoleh penghargaan Desa Mandiri Energi.

Adalah Linggi yang berada di balik keberhasilan listrik mandiri ini, sekaligus menjadi inspirator warga lainnya untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri memanfaatkan sumber daya alam guna menghasilkan

energi dan menggerakkan roda pembangunan desa.

Linggi adalah anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang dikenal sederhana dan mendahulukan kepentingan rakyat. Dalam percakapan dengan Tim BaKTI di sela-sela pembuatan film dokumenter Praktik Cerdas, terungkap bahwa ia baru satu kali ke Jakarta untuk urusan dinas, sementara rekan-rekannya setidaknya telah ke ibukota negara sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 3 bulan setelah dilantik. Ia juga hanya berkantor di gedung DPRD setiap hari Senin dan Selasa, waktu selebihnya dihabiskan di desanya.

Mikrohidro di Mamasa memang identik dengan Linggi, karena ia adalah

anggota tim program mikrohidro yang memberi pelatihan teknis ke berbagai wilayah di Indonesia.

Di desanya, Linggi adalah tokoh masyarakat yang aktif di Gereja Toraja Mamasa sebagai pelayan firman dan pengurus administrasi gereja.

Yang menarik dari mikrohidro Desa Batang Uru, karena penyediaan turbin untuk pembangkit listriknya pun dihasilkan sendiri. Turbin-turbin ini disuplai ke desa-desa lain yang menjalankan program mikrohidro.

Untuk menghasilkan turbin-turbin ini, Desa

Batang Uru mendirikan satu bengkel yang mempekerjakan 12 pemuda setempat. Pemuda-pemuda ini rata-rata lulusan SD atau bahkan tidak sempat menyelesaikan pendidikan dasar. Namun mereka diberi pelatihan dan bekal kemampuan sehingga mampu memproduksi turbin.

Dari tahun 1993 sampai 2009, inisiatif mikrohidro yang dirintis oleh Pak Linggi telah menghasilkan sekitar 115 pembangkit listrik berkapasitas lebih dari 1 megawatt, dan disalurkan ke lebih dari 15 ribu pelanggan.(*)

* Untuk menulis tentang profil Pak Linggi dan Listrik Mandiri di Kabupaten Mamasa, BaKTI menyediakan informasi, data dan latar belakang program. Silakan menghubungi:

Desta/08129044605

(cdpratama@bakti.org/cdpratama@gmail.com)

Kiko/08124215088

(kiko@bakti.org/Victoria.ngantung@gmail.com)

2. Konferensi Pers

Kelompok masyarakat atau individu dapat mengadakan konferensi pers untuk mengumpulkan jurnalis dan menyebarkan informasi yang dinilai penting dan memiliki nilai berita. Praktik cerdas yang dinilai memiliki nilai berita bagi media massa adalah kegiatan yang merupakan terobosan baru, inovatif, menjawab masalah kemasyarakatan yang tengah hangat dibicarakan.

3. Kunjungan ke kantor redaksi (*media visit*)

Kelompok masyarakat atau individu dapat mengadakan kunjungan ke kantor redaksi media, yang lazim disebut sebagai *media visit*. Manfaat kegiatan ini tidak hanya untuk menginformasikan praktik cerdas yang hendak diberitakan, tapi sekaligus menjalin kontak personal dengan jurnalis/redaktur. Untuk melakukan kunjungan ke kantor redaksi, sebaiknya disiapkan siaran pers yang menjelaskan praktik cerdas, brosur lembaga atau lembar fakta yang memuat informasi mengenai kegiatan dan pencapaian lembaga, dokumentasi praktik cerdas berupa foto, poster atau rekaman video.

4. Kunjungan media ke lokasi praktik cerdas (*media tour*)

Kelompok masyarakat atau individu dapat mengusulkan liputan langsung atau mengundang jurnalis dari satu atau beberapa media untuk mengunjungi lokasi praktik cerdas. Kegiatan ini dikenal dengan nama *media tour*, yang bertujuan menunjukkan secara langsung praktik cerdas kepada jurnalis. Kelebihan dari kegiatan ini adalah jurnalis dapat menilai langsung kondisi di lapangan dan mendapatkan informasi dari tangan

pertama melalui wawancara dengan pemrakarsa dan masyarakat yang mendapat manfaat dari kegiatan. Lamanya *media tour* hendaknya disesuaikan dengan jarak tempuh ke lokasi dan memperhitungkan kecukupan waktu yang digunakan meninjau kegiatan dan mewawancarai narasumber penting.

Sebelum menghubungi dan menjajaki kerjasama dengan media massa, hendaknya kelompok masyarakat atau individu memiliki pengetahuan yang memadai tentang sifat dan bentuk media serta ragam produksi media.

Sifat, Bentuk dan Skala Media

Di Indonesia, sebagian besar media cetak, elektronik dan online adalah media komersial yang menggantungkan pendapatan dari iklan atau biaya berlangganan. Sementara lembaga penyiaran publik yang secara tegas mengedepankan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat yang tidak dilandasi kepentingan komersial adalah TVRI dan RRI.

Pada dasarnya, untuk menawarkan peliputan praktik cerdas yang memiliki nilai berita yang besar, tidaklah sulit, mengingat media massa senantiasa membutuhkan berita yang menarik dan aktual. Namun, penting untuk menilai media mana yang memiliki komitmen untuk memberitakan kegiatan pembangunan berbasis kemasyarakatan dan media mana yang memberi pertimbangan besar bagi keuntungan bisnis dan pemasukan iklan dari setiap berita atau program yang dihasilkannya. Target audiens setiap media juga perlu dicermati sebelum memutuskan media mana yang dipilih untuk promosi. Surat kabar atau majalah berita yang menyebut diri sebagai “media umum”, misalnya, mencerminkan bahwa target audiensnya adalah masyarakat umum dari berbagai latar

belakang sosial, ekonomi dan budaya. Sementara media yang dengan jelas menggunakan nama seperti “harian bisnis” atau “radio mitra usaha anda”, sudah jelas menargetkan pelaku pasar dan pengusaha sebagai audiens utamanya.

Peluang untuk diberitakan di media cetak, radio dan portal berita (online media) pada umumnya jauh lebih besar dibandingkan televisi, sebab dengan hanya mengandalkan siaran pers saja, media cetak, radio dan portal berita sudah dapat memproduksi berita, sementara televisi membutuhkan rekaman audio visual yang memadai dan produksi program yang lebih rumit.

Sebelum memilih strategi promosi melalui media massa, perlu juga diperhatikan skala praktik cerdas yang hendak diberitakan. Praktik cerdas yang skalanya kecil memiliki peluang untuk diberitakan di media lokal mengingat lokalitas peristiwa sesuai dengan target pembaca media daerah. Namun tidak tertutup peluang, sebuah praktik cerdas meski berskala kecil, tapi bila dinilai sebagai inovasi yang inspiratif dan layak ditiru, media nasional juga dapat menyiapkan ruang pemberitaan.

Contoh Media Online:

www.tabloidjubi.com

CONTENT VIEW HITS : 1060503
TUESDAY, 08 DECEMBER 2009 05:00:06

tabloidjubi.com
Satnya Jujur Bicara

Add Your Banner Here

LEGO : Persipura dan Persiwa Simbol Kebangkitan Sepak Bola Papua

Search 117 guest

TABLOID JUBI BERITA ARTIKEL TONG PU SUARA PRODUCTS VIDEO STREAMING LINKS EMAIL CONTACTS

We Are Papuan,

Klik Banner Di Atas Untuk Mendapatkan Informasi Penghargaan Pembela Hutan Papua 2010

Peti Mendukung Mama-Mama Papua Mendapatkan Fasilitas Pasar

367 signatures

JUBI VIDEO STREAMING

buku sekolah elektro

Seputar Tanah Papua Jayapura

07 December 2009 Kantor DPRD Tolikara Dirusak Massa
07 December 2009 Warga Afghanistan Tertahan di Merauke
07 December 2009 Komisi Amdal Merauke

JUBI UTAMA

Bocah-Bocah Bomela Makan Tiga Hari Sekali

"Hari mulai gelap. Ketiga bocah itu berjalan tergesa-gesa....mereka ingin mencari

www.yascita.or.id

PORTAL YASCITA GROUP

KENDARI TV | SWARA ALAM | SWARA HATI | JAHN

Unihalu Menyiapkan 224 Dosen dalam UAN

Written by Anakia
Thursday, 12 February 2009 15:38

Mengawasi jalannya ujian nasional SMA dan Madrasah Alah yang akan berlangsung bulan April mendatang, Universitas Haluoleo akan menurunkan sekitar 224 dosen sebagai pengawas.

[Read more...](#)

Honor Pol PP Sultra tertunda di Bayarkan

Written by Anakia
Thursday, 12 February 2009 15:08

Sudah 2 bulan anggota polisi Pamong Praja Sultra belum menerima honor, selain itu satuan Pol PP juga akan melakukan pengurangan anggota.

[Read more...](#)

More Articles...

- > Polda Tarik Personil dari Pertambangan emas Bombana
- > Demam Berdarah Mulai Mewabah di Sultra
- > Simulasi Pengamanan Pemilu Polda Sultra
- > Razia Siswa oleh Diknas Kendari
- > Politik Beras jelang Pemilu 2009

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 >>

0 9 10 Next > End >>

login module

Username

Password

Remember Me

Login

Forgot your password?
Forgot your username?
Create an account

W3C, accessible, flexible
powerful + professional

Google Custom Search

Home
Profil
Visi Misi
Program Kerja
Berita
Kontak Kami

Contoh Praktik Cerdas

Masyarakat Tentukan Data Kemiskinan dan Rencana Aksi Desa

Oleh Aditya Yudistira

Yayasan Karampuang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat melakukan inovasi baru bagi gerakan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini bernama Rencana Aksi Desa atau RAD. Program ini lahir dari hasil diskusi bersama antara Yayasan Karampuang, Bappeda Kabupaten Mamuju, Unicef dan rekan aktivis dari Polman di Kafe Gale Pantai Mamuju.

RAD adalah tindak lanjut dari program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) maupun program Pemutakhiran Data Kemiskinan Berbasis Masyarakat (PDKBM) yang telah menghasilkan data pembangunan berdasarkan kondisi wilayah di Kecamatan Simkep, Tapalang dan Kalukku yang dibutuhkan bagi perencanaan pembangunan dan program bantuan untuk masyarakat miskin yang tepat sasaran. Beberapa SKPD terkait telah menggunakan data SIPBM, di antaranya Dinas Pendidikan, Kantor Catatan

Sipil dan Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga digunakan oleh Kantor Desa.

SIPBM dilaksanakan pertamakalinya di Kabupaten Mamuju sebagai proyek perintis di Kecamatan Simkep (Simboro Kepulauan), sementara SIPBM berikutnya dilakukan di dua kecamatan yakni Tapalang dan Kalukku. Perubahan nama menjadi PDKBM mencerminkan semangat dari perencanaan pembangunan yang bersifat lebih komprehensif dan terkait target *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015 yang diantaranya adalah:

- Memberantas kemiskinan dan kelaparan
- Mencapai pendidikan dasar untuk semua
- Kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan
- Menurunkan angka kematian anak
- Meningkatkan kesehatan ibu
- Memerangi penyakit menular
- Menjamin kelestarian lingkungan hidup
- Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Tahapan Pelaksanaan SIPBM

1. Pelatihan bagi fasilitator kecamatan yang menitik-beratkan pada simulasi yang menjadi pokok kegiatan SIPBM berupa Lokakarya Desa.
2. Pelaksanaan Lokakarya Desa yang menjadi medium penggalan gagasan di setiap desa untuk menentukan kriteria pendataan.
3. Lokakarya Kecamatan untuk penyusunan instrumen pendataan pada tingkat kecamatan yang mencakup:
 - ◆ Kemampuan konsumsi nasi dalam sehari
 - ◆ Kemampuan konsumsi ikan/sayuran dalam sehari
 - ◆ Atap rumah terbuat dari rumbia, rotan atau seng berkarat
 - ◆ Lantai rumah terbuat dari tanah, bambu dan papan kelas III

- ♦ Dinding rumah terbuat dari *gamacca* (dinding anyaman bambu) dan papan kelas III
 - ♦ Luas rumah kurang atau sama dengan 5 x 7 meter
 - ♦ Kemampuan membeli pakaian dalam setahun
 - ♦ Jenis pekerjaan utama
 - ♦ Status kepemilikan rumah
 - ♦ Status kepemilikan tanah untuk bangunan rumah
 - ♦ Kepemilikan lahan/sawah/empang dan perahu
4. Pelatihan pendata di mana petugas pendata harus berasal dari lokasi/ dusun setempat
 5. Pendataan di mana satu orang petugas mendata 50 hingga 70 KK
 6. Penyusunan, penyuntingan dan tabulasi data sementara
 7. Rekonfirmasi data kepada masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat

Data kemiskinan diperoleh dari indikator pokok yang meliputi pangan, sandang dan papan yang diperkuat oleh indikator penunjang yang mencakup pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan indikator tambahan lainnya seperti kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah maupun dokumen tanah dan seterusnya.

Data kemiskinan yang diperoleh terdiri dari:

- a) Miskin sementara:
yang diperoleh dari hasil pendataan
- b) Miskin:

Setelah melalui proses rekonfirmasi data sehingga dianggap hasil akhir dari data kemiskinan

Rencana Aksi Desa (RAD) Sebagai Advokasi Program SIPBM-PDKB

RAD adalah penjangkaran aspirasi masyarakat yang partisipatif terkait dengan perencanaan program pembangunan.

Konsep program pemerintah yang ditawarkan melalui Musrembang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat karena hanya berorientasi pada pembangunan fisik, sementara RAD mencakup pembangunan fisik dan non fisik yang bersifat pemberdayaan dan penyadaran.

Empat kerangka utama RAD yang juga menjadi dasar perencanaan pembangunan yakni:

1. PKK dan KIA
2. Ekonomi Produktif
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan
4. Sarana fisik

Pembiayaan kegiatan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini Bappeda dengan dukungan UNICEF dan CIDA serta Yayasan Karampuang yang menyiapkan bantuan teknis.

RAD dilaksanakan di seluruh desa di tiga kecamatan yang mendapatkan intervensi program SIPBM, yakni:

■ Kecamatan Simkep

Terdiri dari lima desa (Sumare, Bala-balakang, Botteng Utara, Botteng, Saletto) dan dua kelurahan (Rangas dan Simboro)

■ Kecamatan Tapalang

Terdiri dari empat desa (Takandeang, Bela, Taan, Orobatu) dan dua kelurahan (Kasambang dan Galung) yang selanjutnya mengalami pemekaran sehingga menjadi enam desa (penambahan dua desa, Kopeang dan Tampilang)

■ Kecamatan Kalukku

Terdiri dari dua kelurahan (Kalukku dan Bebanga) dan sepuluh desa (Sinyonyoi, Guliling, Beru-beru, Uhaimate, Kalukku Barat, Sondoang, Keang) yang selanjutnya mengalami pemekaran menjadi sebelas desa (penambahan satu desa, yakni Pammulukang).

RAD dilaksanakan selama sehari mulai pukul 09.00 hingga selesai di setiap desa sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Pelaksananya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader Posyandu, tokoh pemuda, Karang Taruna dan remaja mesjid.

Proses penyusunan RAD diawali dengan pengenalan dan pengantar dari Kepala Desa atau Lurah, disusul dengan penjelasan dari fasilitator terkait hasil pendataan yang telah dilakukan dalam program PDKBM dan SIPBM. Fasilitator mengarahkan penggalian ide dan gagasan masyarakat dalam 4 kerangka utama yang telah disebutkan di atas.

Penentuan kerangka utama ini didasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat, sementara fasilitator mengarahkan penggalian aspirasi masyarakat melalui metode *mind map* atau metode matahari di mana setiap warga yang hadir berhak mengusulkan program dan menuliskan sendiri di karton *mind map*. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk menyusun skala prioritas dengan sistem skoring sehingga lahirlah 3 prioritas dari masing-masing kerangka utama.

Setiap usulan program yang menjadi prioritas juga diarahkan pada sumber biaya, di mana alternatif pembiayaan adalah dana ADD, APBD, PNP dan swadaya atau bantuan pihak ketiga. Diharapkan program yang diusulkan bisa seiring dengan program lainnya misalnya program yang telah menjadi usulan di PNPM tidak lagi diusulkan sehingga efektif dan tidak tumpang

tindih. Fasilitator dituntut untuk mampu menggali informasi seoptimal mungkin dari masyarakat yang hadir.

Dari empat kerangka utama yakni: PKK dan KIA; Ekomomi Produktif; Peningkatan Kapasitas kelembagaaan; serta Sarana Fisik diperoleh masih-masing 3 usulan program setelah melalui skoring, Hasil kesepakatan Rancangan Aksi Desa ini diperkuat oleh sebuah berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat. Hasil ini kemudian diteruskan ke Bappeda Kabupaten Mamuju untuk diusulkan ke tingkat Kecamatan.(*)

*Penulis adalah staf Yayasan Karampuang yang melaksanakan Pemutakhiran Data Kemiskinan Berbasis Masyarakat sebagai respon atas berbagai permasalahan yang timbul akibat tidak akuratnya data kemiskinan di Sulawesi Barat. Kontak: Jl. Ir. Djuanda Komp. Transmigrasi No. 32 B, Mamuju, email: y_karampuang@yahoo.co.id, 081524397433/08114206011

Praktik Cerdas Perempuan Sultra, Dari Getah Pepaya Hingga Persemaian Benih Jati

Oleh Husnawati

Masyarakat sudah sering mengolah sumber daya lokal dan juga bahan buangan atau limbah yang ada di sekitar. Namun karena kegiatan yang dilakukan belum mendapat sentuhan teknologi tepat guna dan tidak disertai peningkatan keterampilan, sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas dan belum dapat disebarluaskan.

Berawal dari kepedulian sebagai lembaga swadaya masyarakat, Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra) melihat banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita, khususnya perempuan.

Kelompok yang menjadi sasaran kegiatan adalah perempuan yang pekerjaannya sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan semacam ini didasari pada semangat untuk memperkenalkan upaya inovatif yang tidak memerlukan

waktu yang lama, dana yang besar dan bahannya mudah diperoleh.

Terdapat tiga praktik cerdas yang dilakukan kelompok perempuan dengan pendampingan dari Alpen Sultra, yakni:

1. Pemanfaatan getah pepaya untuk meningkatkan mutu minyak kelapa tradisional. Pembuatan minyak kelapa dilakukan dengan menambahkan getah dari buah dan tangkai pohon pepaya, sehingga minyak tidak tengik, lebih wangi, lebih bening dan lebih tahan lama. Bahan bakunya banyak terdapat di pekarangan rumah warga, yang dikenal sebagai “Warung Hidup”. Pembuatannya pun mudah, yakni dengan mengambil getah dari buah pepaya yang masih muda dan tangkai pohon pepaya. Getah dikumpulkan dalam sebuah wadah dengan ukuran kira-kira sebesar gelas minuman lalu dimasukkan ke dalam minyak kelapa yang sedang dimasak. Getah yang sudah dimasukkan terus diaduk hingga tercampur rata. Selain getahnya, daun pepaya pun dapat dimanfaatkan dengan jalan merebus atau diaduk bersamaan dengan santan kelapa yang akan dibuat minyak.
2. Pemanfaatan botol plastik bekas air mineral yang digunakan sebagai alat pelampung pembudidayaan penanaman rumput laut. Perempuan pesisir yang bekerja sebagai petani rumput laut mengumpulkan botol-botol tersebut untuk dijadikan sebagai pelampung penahan beban tali yang mengikat tanaman rumput laut yang dibentangkan di atas permukaan laut. Pelampung-pelampung ini sangat membantu dalam proses pembudidayaan dan pemeliharaan. Botol-botol diikat pada tali dengan jarak tertentu yang sudah ditetapkan. Meski berupa bahan bekas, tapi sebagai

pelampung, botol bekas ini sangat kuat, elastis, ringan, mudah diperoleh, terjangkau serta dapat digunakan berulang-ulang.

3. Inovasi pada pembenihan tanaman jati lokal dilakukan oleh kelompok perempuan Kabupaten Konawe Selatan. Secara teori, benih yang akan disemai terlebih dahulu ditabur pada bedengan kemudian dibakar, namun cara tersebut memiliki tingkat keberhasilan hanya 40% untuk tumbuh. Praktik pembenihan yang dilakukan oleh kelompok perempuan Kabupaten Konawe Selatan adalah melalui pemberian perlakuan terhadap benih sebelum disemai. Benih terlebih dahulu dimasukkan ke dalam karung yang berongga dan mudah menyerap air. Kemudian benih di dalam karung direndam ke dalam pembuangan penampungan air atau ke dalam air berlumpur selama tiga hari tiga malam. Setelah tiga hari benih tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama satu hari. Keesokan harinya benih ditaburkan ke bedeng yang telah disiapkan.

Teknik lain yang juga biasa dilakukan yakni perendaman benih dengan air panas selama minimal tiga hari tiga malam, di mana setiap pagi benih tersebut dijemur di bawah sinar matahari dan di sore hari dilakukan lagi perendaman sampai esok hari untuk penjemuran. Proses dilakukan selama tiga berturut-turut. Metode bertujuan untuk memudahkan pertumbuhan kecambah pada benih jati tersebut. Cara ini memiliki 85% tingkat keberhasilan tumbuh.

Praktik persemaian yang dilakukan oleh para kelompok perempuan petani jati sudah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun. Di tahun ketiga, kegiatan persemaian jati kelompok perempuan sudah mempunyai kebun benih sendiri dengan

usia bibit jati yang dimiliki kelompok perempuan di kebun benih sudah berumur kurang lebih 3 tahun dan tinggi pohon bibit Jati tersebut sudah mencapai sekitar 6 meter.

Kebun benih milik kelompok ini adalah sebanyak 4 buah yang tersebar di 2 kecamatan dan 2 desa, yakni Kecamatan Laynea yang terdiri dari Desa Aoreo dan Desa Pamandati, serta Kecamatan Laeya yang terdiri dari Desa Lambakara dan Desa Ambalodangge di Kabupaten Konawe Selatan. Perlakuan pada benih yang akan disemai ini adalah cara mudah dan murah sehingga dapat direplikasikan di daerah lain. (*)

*Penulis adalah staf Aliansi Perempuan (ALPEN) Sultra yang berfokus pada jender, pemberdayaan masyarakat, masyarakat pesisir dan ekonomi lokal, khususnya produksi rumput laut. Kontak: Jl. Malik III No. 127, Kendari, email: alpen.sultra@gmail.com, 081341517413

Memanfaatkan Pemetaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kampung

Oleh Bertha Ronsumbre

Meos Mangguandi adalah salah satu pulau di gugusan pulau-pulau Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Daerah ini mempunyai potensi sumber daya alam darat dan laut yang cukup berlimpah, seperti kelapa, kayu besi, bintanggor, matoa dan bermacam-macam jenis anggrek.

Selain itu Meos Mangguandi merupakan daerah potensial untuk perikanan tangkap karena memiliki hamparan terumbu karang dan laguna yang luas. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Yayasan Terangi bersama Yayasan KEHATI Jakarta, Yayasan Rumsram dan LIPI-Biak pada tahun 2000, dikatakan tutupan terumbu karang kawasan ini sebesar 43,21% dengan jenis dan koloni karang yang cukup beragam dan bervariasi, seperti *Tabulate*, *Acropora*, *Goniopora spp* dan *Porites nigrescens*. Berkat keragaman terumbu karang ini,



setidaknya terdapat 88 jenis ikan di perairan Meos Mangguandi, yang sangat variatif dibandingkan kawasan lainnya di Kepulauan Padaido.

Kekayaan laut ini menjadikan Meos Mangguandi sebagai daerah tangkapan bersama bagi masyarakat di sekitar Kepulauan Padaido Atas, Kepulauan Padaido Bawah dan Pulau Biak serta nelayan-nelayan dari luar Papua. Akibatnya, eksploitasi dengan menggunakan bahan peledak dan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan juga sering dilakukan oleh masyarakat nelayan dari luar Pulau Meos Mangguandi, termasuk nelayan dari Biak Kota dan pulau tetangga lainnya. Mereka menggunakan bom sianida dan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Berangkat dari kondisi di atas, maka pada tahun 2000 masyarakat memulai kegiatan konservasi dan melarang

penangkapan ilegal yang dilakukan oleh orang luar, di wilayah adat masyarakat pulau ini. Perjuangan untuk melindungi hak masyarakat atas sumber daya alam laut, awalnya hanya dilakukan oleh pemimpin masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Gereja, melalui teguran kepada pihak atau oknum yang melanggar. Sayangnya, hal ini tidak menyelesaikan masalah. Nelayan dari luar tetap datang untuk menangkap dengan alat-alat yang merusak lingkungan laut. Penyebabnya, karena laut masih dianggap sebagai sumber daya bersama yang dapat dimanfaatkan bersama pula.

Kondisi ini kemudian mendorong inisiatif masyarakat Meos Mangguandi untuk melindungi sumber daya laut milik mereka dengan menggunakan peta sebagai alat bantu. Peta dipilih oleh masyarakat setelah melihat kasus yang dialami oleh masyarakat adat Saba Marao di pesisir Timur Pulau Biak pada tahun 1997 yang telah kehilangan 325 hektar tanahnya untuk pembangunan Hotel Marao. Saat itu masyarakat Saba Maro dan Opiaref harus berjuang melawan pemerintah dan investor yang lagi-lagi akan mengambil tanah dan laut mereka untuk perluasan pembangunan Hotel Marao.

Keberhasilan masyarakat Saba Marao dan Opiaref ini menjadi contoh bagi masyarakat Biak, khususnya masyarakat Padaido Atas dan Padaido Bawah bahwa dengan pemetaan tanah adat maka masyarakat menjadi terorganisir dan dapat bersama-sama mempertahankan tanah dan laut mereka.

Keberhasilan itu juga kemudian mendorong masyarakat adat Meos Mangguandi, untuk membuat peta yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam penyelesaian masalah dan memperkuat posisi tawar-menawar dengan pihak luar guna memperoleh pengakuan atas haknya, juga sebagai alat pengorganisasian masyarakat.

Proses dan Hasil Pemetaan

Masyarakat adat di Meos Mangguandi mulai melakukan kegiatan pemetaan pada tahun 2000. Proses yang dilakukan oleh SekPro PLKL Biak dan LMMA-Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penjajakan keinginan masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif serta tujuannya;
2. Penggalan informasi tentang potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam penggalan informasi, aspek yang dilihat antara lain;
 - a. Sejarah asal usul masyarakat dan kepemilikan kampung/pulau serta bagaimana pengakuan di antara marga/*kekerabatan* antara satu terhadap yang lain dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
 - b. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi;
 - c. Jenis-jenis peta tematik apa yang dibutuhkan.
3. Sosialisasi manfaat pembuatan peta partisipatif dengan cerita kasus yang dialami oleh masyarakat di tempat lain;
4. Pelatihan teknis pemetaan partisipatif;

Dari kegiatan selama 4 tahun, 9 peta berdasarkan tema yang telah dihasilkan oleh masyarakat, yaitu:

1. Peta Jenis Tanah
2. Peta Penggunaan Tanah
3. Peta Pemukiman
4. Peta Batas Wilayah Tangkapan Tradisional
5. Peta Sebaran Potensi dan Habitat Laut
6. Peta Abrasi
7. Peta Daerah Lindung Laut
8. Peta Pemukiman
9. Peta Presentasi Terumbu Karang Hidup, tahun 2005.

Setelah pembuatan peta selesai, masyarakat Pulau Meos Mangguandi sepakat untuk menyusun Aturan Adat dan menyusun Statuta Lembaga Adat. Masyarakat sadar, kehadiran peta yang tidak didukung dengan aturan yang menjelaskan cara pemanfaatan sumber daya alam tetap akan membuka celah bagi eksploitasi.

Aturan Adat mengenai Peraturan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Statuta Lembaga Adat yang telah disusun, kemudian disahkan menjadi peraturan kampung.

Dengan adanya peta dan aturan PSDA; masyarakat mengetahui dan memahami potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Meos Mangguandi dan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai dampaknya, ada dorongan dan inisiatif dari masyarakat untuk menjaga potensi alam agar tidak habis terkuras.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan kawasan lindung. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi biota laut yang hampir punah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti teripang, ikan kakap, kima dan lain sebagainya. Saat ini di Pulau Meos Mangguandi terdapat 3 lokasi lindung yang dijaga dan dikelola oleh tim konservasi kampung. (*)

*Penulis adalah staf Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut (Locally Managed Marine Area) Kontak: Jl. Bosnik Raya No. 5 RT.02/II, Biak, plkl_biak@yahoo.com, 081344146950, 0981-26303

“Bank Ikan” untuk Melestarikan Sumber Daya Pesisir

Oleh Ma'ruf Kasim

Sumberdaya pesisir memegang peranan yang sangat vital dalam menopang kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Mengingat perannya ini, maka tentu sangat disayangkan bila dalam pemanfaatannya, terjadi eksploitasi yang mengakibatkan degradasi lingkungan.

Untuk mengatasi degradasi lingkungan, salah satu langkah antisipatif yang hendaknya digalakkan adalah mengoptimalkan peran masyarakat menjaga sendiri lingkungan mereka. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sumberdaya bagi kehidupan mereka dapat dilakukan secara terus menerus dengan berbagai cara dan strategi. Model penyadaran yang terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat adalah pendekatan yang tepat.

Belajar dari pengalaman selama ini, telah banyak program yang disusun dan disalurkan kepada masyarakat pesisir,

namun sayangnya tingkat keberlanjutannya rendah. Realitas menunjukkan, begitu program selesai, maka berakhir pula kepedulian melanjutkan program dan bahkan kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri.

Disadari bahwa salah satu program pengelolaan sumberdaya pesisir dengan nama *Marine and Coastal Resources Management Project* (MCRMP) yang ada di hampir seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia, merupakan program yang melahirkan konsep pengelolaan pesisir terpadu. Konsep ini melahirkan 4 buah dokumen pengelolaan yang meliputi dokumen rencana strategis, dokumen rencana zonasi, dokumen rencana pengelolaan dan dokumen rencana aksi. Keempat dokumen ini menyinergikan suatu konsep pengelolaan wilayah pesisir yang komprehensif, terintegrasi, rapi dan terstruktur. Selain itu juga, memang dalam realisasi program di tingkat desa, ada beberapa program seperti pengembangan mata pencaharian alternatif dan pengelolaan sumberdaya alam skala kecil (SNRM). Namun subprogram MCRMP ini sangat singkat dengan model pengelolaan yang sifatnya berbasis proyek sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pesisir. Sangat disayangkan, dengan berakhirnya program MCRMP pada tahun 2008, maka berakhir pula semua konsep pengelolaan pesisir. Sejumlah dokumen yang dilahirkan hanya terpajang di lemari kantor-kantor Bappeda dan Departemen Kelautan dan Perikanan di provinsi dan kabupaten.

Tentu model pengelolaan semacam ini tidak efektif karena rendahnya kepedulian melanjutkannya. Pihak pemerintah, misalnya, enggan meneruskan dan mengambil alih skenario pengelolaan terpadu ini untuk diaplikasikan dalam konsep pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir. Inisiatif

pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat itu sendiri, juga tidak dapat diharapkan.

Belajar dari MCRMP, disadari bahwa salah satu pendekatan terbaik adalah bagaimana mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kesadaran masyarakat pesisir akan terbangun jika mereka benar-benar melihat manfaat yang nyata program yang dirancang untuk masyarakat.

Pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa sumber daya pesisir tidak akan habisnya, mulai pudar seiring dengan pengalaman bahwa mereka harus mencapai daerah yang cukup jauh hanya untuk mendapatkan sedikit sumberdaya demi memenuhi kebutuhan. Ditambah lagi sudah semakin berkurangnya ikan yang menjadi sasaran penangkapan mereka. Hal ini merupakan pembelajaran yang sangat berarti bagi masyarakat pesisir dan ini pulalah yang dapat memberikan ide pembelajaran program yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Untuk memberikan model pembelajaran yang optimal dan efektif di kalangan masyarakat pesisir memang tidaklah mudah, apalagi bila hanya dilakukan dengan pendekatan yang instan.

“Bank Ikan” Milik Bersama

Salah satu program pelestarian lingkungan yang dapat dijadikan contoh pendekatan yang terstruktur dan berbasis pada peningkatan partisipasi masyarakat adalah program penetapan daerah perlindungan laut di 43 desa yang difasilitasi oleh Coremap II Kabupaten Buton khususnya dan umumnya seluruh desa di wilayah Coremap II Kawasan Timur Indonesia yang didukung Bank Dunia.



Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai kawasan konservasi laut di desa memegang peran yang sangat strategis dalam memelihara kawasan laut dangkal dengan ekosistem terumbu karang yang ada di dalamnya. Penetapan DPL dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui tahapan pertemuan tingkat desa yang dihadiri oleh unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa dan masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk membahas penetapan lokasi, luasan areal, posisi penetapan tapal batas, aturan-aturan termasuk sanksi-sanksi dalam penetapan yang akan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) mengenai DPL.

Pada umumnya perdebatan mengenai penetapan DPL berlangsung dinamis karena ide dan seluruh aturan main dirumuskan sendiri oleh masyarakat. Penetapan sanksi

merupakan bagian terpenting yang mengambil waktu tersendiri karena berhubungan dengan akses masyarakat ke sumber mata pencaharian mereka. Tidak jarang banyak warga yang kurang setuju dan melemparkan protes terhadap penetapan aturan-aturan dalam DPL. Dinamika dalam penetapan aturan DPL yang kemudian dituangkan dalam Perdes merupakan cermin dari kepedulian masyarakat untuk tetap mempertahankan eksistensi sumberdaya ikan dan non-ikan yang ada di kawasan terumbu karang mereka.

Tindak lanjut dari penetapan DPL adalah perumusan perdes yang merupakan aturan tertinggi di tingkat desa, yang mengikat seluruh komponen masyarakat desa. Dalam perdes tercantum seluruh aspek penetapan DPL sampai pada sanksi yang akan diterapkan. Jika ada oknum masyarakat yang mencoba mengambil sumberdaya pada daerah yang dilindungi akan segera dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Luasan DPL memang diharapkan minimal sekitar 10 % dari total luasan terumbu karang yang ada di desa. Namun demikian, sampai saat ini masyarakat sangat merasakan bahwa DPL merupakan “bank” ikan yang ada di sekitar desa mereka. Tidak jarang beberapa desa akhirnya menetapkan untuk memperluas DPL itu sendiri dengan harapan peningkatan jumlah ikan yang lebih banyak.

Dari kajian ekologi, DPL merupakan kawasan yang dilindungi dari segala aktivitas penangkapan ikan dan sumberdaya laut lainnya, sehingga akan memberikan rasa aman bagi ikan dan sumberdaya non-ikan untuk bersembunyi, mencari makan, berkembangbiak dan bertahan hidup. Indikator yang sangat jelas terlihat dari keberadaan DPL itu sendiri adalah semakin meningkatnya hasil tangkapan nelayan yang beroperasi di luar daerah DPL. Mereka juga merasakan semakin dekatnya sumberdaya ikan yang

ditangkap dan semakin bervariasi jenis ikan yang ada dan berkembang untuk dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat di sekitar daerah DPL. Dari survei yang dilakukan di seluruh desa binaan Coremap Kabupaten Buton, didapatkan bahwa disamping meningkatnya jumlah hasil tangkapan nelayan, juga mulai muncul beberapa jenis ikan yang menjadi indikator penutupan terumbu karang hidup. Jenis ikan ini mulai berkembang di dalam daerah DPL. Hal ini menunjukkan betapa keberadaan DPL sangat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Memang, DPL merupakan daerah yang tak dapat diambil ikan dan sumberdaya non ikannya. Namun perlu diingat, bila ikan dan sumberdaya non ikan dapat berkembang dengan baik di dalam kawasan ini maka perkembangan tersebut akan berdampak pada peningkatan sumberdaya perikanan hingga ke luar wilayah yang ditetapkan sebagai DPL.

Kegiatan penyusunan, penetapan dan penerapan DPL merupakan salah satu contoh nyata yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan peran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya terumbu karang di wilayah pesisir.

Tidak mudah memang untuk memfasilitasi pembentukan DPL ini namun jika dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, akan mengundang apresiasi dan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaannya. Gambaran riil mengenai bertambahnya jumlah ikan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pesisir serta mulai munculnya keanekaragaman sumberdaya yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat merupakan pendorong kuat untuk menumbuhkan kesadaran yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dengan jelas di 43 desa binaan Coremap II Kabupaten Buton yang merupakan salah satu kabupaten program Coremap II Kawasan Timur Indonesia yang didanai oleh Bank Dunia.

“Bank Ikan” melalui penetapan DPL menjadi langkah strategis untuk mendorong peran masyarakat untuk menjaga sumberdaya pesisir. Semoga program ini terus bergulir ke desa-desa lainnya. (*)

*Penulis adalah staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNHALU, Focal Point dan moderator Milis Jaringan Peneliti (JiKTI), dan Ketua Tim Konsultan COREMAP II Buton. Kontak: Jl. Sultan Hasanuddin No 58 Bau Bau Kab. Buton, marufkasim@hotmail.com, www.marufkasim.blog.com, 085656555664

Dengan Motor yang Terawat, Petugas Kesehatan Selalu Siaga

Oleh Mansetus Balawan

*“Bagi seorang pekerja kesehatan, terlambat semenit
nyawa bisa jadi taruhan”*

(Maria Yasinta Lowa, seorang bidan Desa di Flores NTT)

Pintu rumah Bidan Maria Yasinta Lowa tiba-tiba digedor pada Kamis, 23 April 2009 sekitar pukul 23.30 Wita. Sambil mengusap matanya, perempuan yang akrab disapa bidan Yanti ini bangun dari tidurnya dan bergegas membuka pintu rumah. Di luar sana, seorang bapak sudah menunggu. Dengan suara terbata-bata ia meminta bidan Yanti menolong isterinya yang hendak melahirkan. Setelah mendengar pernyataan kesediaan bidan Yanti, ia pun bergegas pergi.

Mendapat panggilan darurat merupakan hal yang selalu dialami Yanti yang bekerja sebagai seorang bidan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Terkadang panggilan darurat seperti itu datang dari 2-3 orang

secara bersamaan. “Bagi seorang pekerja kesehatan, terlambat semenit saja nyawa bisa jadi taruhan,” tukas bidan Yanti ketika menerima bantuan motor dari Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS).

Kendalanya, demikian tutur bidan asal Nagakeo NTT ini, banyak petugas kesehatan yang bekerja di desa seperti dirinya tidak memiliki kendaraan operasional. “Sulit melayani panggilan pasien dengan cepat di waktu bersamaan,” tuturnya.

Bahkan untuk kasus-kasus darurat tak jarang bisa terjadi kematian karena terlambat memberikan pertolongan. Apalagi di wilayah pedesaan sarana transportasi umum masih sangat minim.

“Syukurlah bahwa kendala yang saya hadapi selama sekitar 10 tahun bekerja sebagai bidan desa itu sudah teratasi dengan kehadiran YKS yang memberikan bantuan sepeda motor kepada saya bulan Maret 2009 lalu. Banyak kemudahan saya dapatkan dan banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan sudah tertolong dengan baik. Meski baru 3 bulan berjalan, satu masalah krusial yang terpecahkan adalah tak ada lagi kematian akibat terlambat pertolongan. Apalagi sepeda motor YKS dikelola dengan sistem khusus sehingga kendaraannya selalu siap pakai,” terang bidan Yanti.

Kisah bidan Yanti di atas adalah gambaran petugas kesehatan yang mengabdikan diri di berbagai daerah di NTT dan Indonesia pada umumnya. Setiap hari mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah binaan mereka.

Beragam pelayanan kesehatan mereka lakoni, mulai dari kegiatan posyandu, imunisasi, menolong persalinan dan melayani panggilan pasien dengan berbagai kasus kesehatan. Karena itu, tak heran bila ada pasien yang tidak terlayani jika panggilan datang dalam waktu bersamaan. Apalagi di antara

pasien yang satu dan yang lainnya berjauhan jaraknya. Bidan Yanti menjelaskan, 6 posyandu yang masuk di wilayah kerjanya, berjarak 6 kilometer dari tempat tinggalnya.

Antara Plat Merah dan Hitam

Lain bidan Yanti, lain pula Marianus Wuring. Petugas kesehatan yang bekerja di Desa Baniona, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur ini memiliki kisah sendiri setelah bekerjasama dengan YKS dalam program Manajemen Sarana Transportasi Kerusakan Minimum Kendaraan (*Zero Breakdown*) untuk pelayanan kesehatan di pedesaan.

Marianus yang juga mendapatkan satu unit sepeda motor dari YKS untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya itu berkisah kalau sebelumnya pernah juga mendapat bantuan sepeda motor dari Dinas Kesehatan atau diistilahkan plat merah.

Tanpa bermaksud membuat perbedaan, Marianus mengaku bahwa ketika menggunakan sepeda motor plat merah dari Dinas Kesehatan, ia merasa ada kecemburuan di antara sesama petugas kesehatan. Karena itu, meski dirinya diberikan kepercayaan menggunakan motor plat merah, namun bila ada petugas kesehatan yang membutuhkan, mau tidak mau harus dipinjamkan. Namun ini bukan letak masalah sebenarnya. Yang jadi soal, ketika ada kerusakan, Marianus sendiri yang menanggung resikonya. “Berbeda dengan motor YKS yang memiliki sistem milik sendiri. Karena itu tidak ada masalah ketika motor itu dipinjamkan ke petugas lainnya untuk pelayanan kesehatan dan terjadi kerusakan,” jelas Marianus ketika memberikan testimoni dalam sebuah pertemuan evaluasi antara YKS dan petugas kesehatan pengendara sepeda motor.

Keunggulan lainnya dari Program Manajemen Sarana Transportasi (MST) dikemukakan pula Ansel Demon, petugas kesehatan yang bekerja di Puskesmas Pembantu Epubele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Ia menilai, dengan program MST kendaraan selalu dalam keadaan siap pakai dan jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi kerusakan pada saat sedang melakukan pelayanan kesehatan. Hal ini karena program yang dikembangkan YKS ini dilakukan dengan teliti, di mana perawatan dilakukan secara terjadwal terhadap semua kendaraan. Hal ini membuat kondisi sepeda motor tetap awet meski sudah 7 tahun dioperasikan. Lain dengan motor plat merah yang terkadang kerusakannya dibiarkan sehingga menyebabkan kerusakan susulan yang menyedot biaya yang melewati kemampuan. Dan akhirnya kendaraan dibiarkan tidak beroperasi lagi karena ketiadaan biaya.

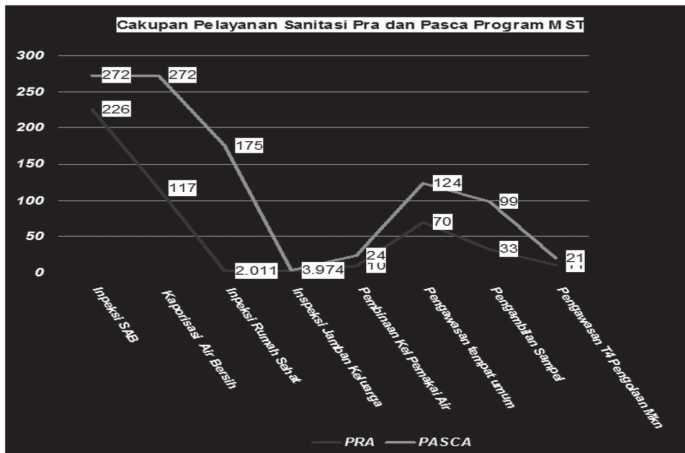
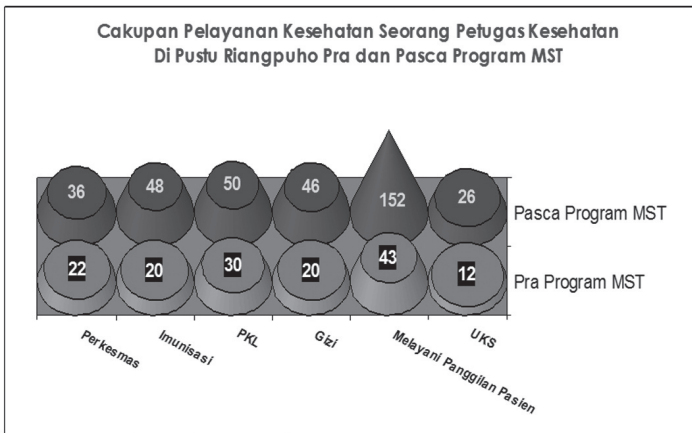
Cakupan Pelayanan Meningkat

Tidak dapat dipungkiri, sejak diimplementasikan pada Juli tahun 2002, Program MST khususnya dengan sistem kerusakan minimum (*zero breakdown*) untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan YKS telah memberikan manfaat, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat penerima, antara lain;

- Kemudahan masyarakat mengakses informasi dan pelayanan kesehatan
- Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
- Respon terhadap panggilan pasien lebih cepat
- Peningkatan jumlah fasilitas sanitasi yang dimonitor
- Peningkatan frekuensi layanan kesehatan bagi sekolah dasar

- Kemudahan dalam melakukan penyisiran kasus-kasus kesehatan
- Meningkatnya pelayanan kesehatan ke desa-desa terpencil.
- Peningkatan kunjungan rumah
- Peningkatan kunjungan ke posyandu

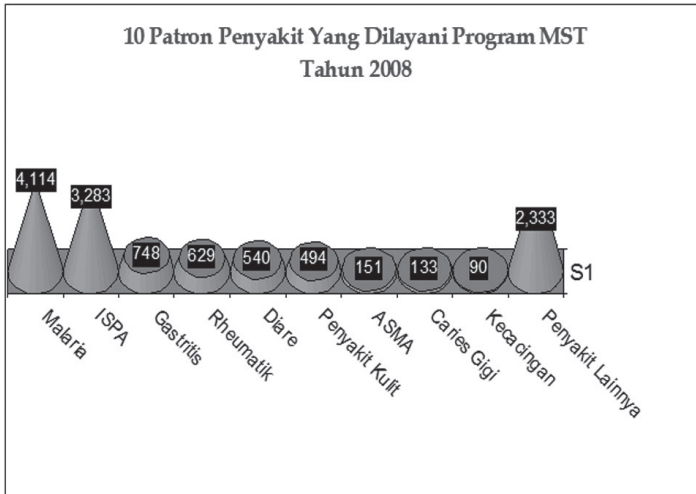
Untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan dari Program MST dapat dilihat pada diagram-diagram yang ditampilkan berikut ini:



Sumber data: logbook pengendara

Grafik di atas menunjukkan terjadinya peningkatan cakupan pelayanan yang sangat signifikan setelah petugas sanitasi mendapat bantuan motor dari YKS.

Sementara untuk melihat kasus-kasus kesehatan menonjol yang dilayani dengan sepeda motor bantuan YKS dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber data: logbook pengendara

Logbook, Alat Kontrol yang Efektif

Demi menjaga efektivitas penggunaan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan, pada saat implementasi program, YKS melibatkan berbagai pemangku kepentingan di antaranya Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan berbagai LSM mitra. Mereka dilibatkan sebagai pemantau lapangan dan disertakan dalam setiap pertemuan monitoring dan evaluasi.

Fungsi pemantauan yakni melihat efektivitas penggunaan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan dan melaporkan kepada YKS setiap pelanggaran yang dilakukan pengendara kesehatan. Dengan demikian, pengendara kesehatan yang



tidak mematuhi tata tertib pemanfaatan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan akan diberikan peringatan. Tindakan lainnya yang dilakukan adalah menarik kembali sepeda motor bantuan dan diberikan kepada pengendara kesehatan lainnya, baik dalam wilayah yang sama atau wilayah lain, bila pengendara bersangkutan masih melakukan pelanggaran. Penarikan sepeda motor juga bisa langsung dilakukan bila terjadi pelanggaran dengan kategori berat seperti kecelakaan yang terjadi karena mabuk.

Lebih dari itu, para pengendara kesehatan juga dikontrol melalui sebuah buku yang disebut *logbook*. Artinya setiap aktivitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan sepeda motor selalu dicatat dalam buku tersebut. Isinya mencantumkan angka spidometer awal saat berangkat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan, tempat tujuan, jenis pelayanan yang dilakukan, kasus kesehatan yang ditangani, jumlah sasaran,

dan spidometer saat berada di tempat tujuan. Semuanya dibukukan secara teratur untuk memastikan bahwa penggunaan kendaraan benar-benar untuk melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu, dari *logbook* pengendara, YKS bisa mendapatkan data pelayanan kesehatan di wilayah kerja dari masing-masing pengendara kesehatan.

Bermula dari FGD

Inisiatif mengembangkan program Manajemen Sarana Transportasi (MST) khususnya dengan sistem kerusakan minimum (*zero breakdown*) untuk pelayanan kesehatan di daerah pedesaan oleh Yayasan Kesehatan untuk Semua/Health for All (YKS/HfA), bermula dari sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kondisi kesehatan ibu anak bersama petugas kesehatan dan penyuluh lapangan KB se-Kabupaten Flores Timur pada awal Juli 2000. Dalam diskusi itu terungkap bahwa banyak ibu dan bayi yang meninggal hanya karena terlambat dirujuk ke pusat-pusat pelayanan kesehatan atau karena petugas kesehatan datang terlambat. Hal ini dikarenakan ketiadaan sarana transportasi, baik transportasi umum untuk masyarakat maupun untuk petugas kesehatan. Akibatnya masih banyak orang di daerah pedesaan menderita dan bahkan meninggal karena penyakit atau kasus kesehatan yang sebetulnya bisa ditangani. Kondisi ini dapat ditemukan di hampir semua wilayah NTT.

Permasalahan ini memacu Willy Balawala untuk mencari informasi lewat email. Dalam proses pencarian informasi itu, ditemukan *Riders for Health* (RfH) UK yang telah mengembangkan program tersebut di beberapa negara di Afrika. Informasi ini kemudian dikonfirmasi kepada Simon Millward dari *Millennium Rider*. Simon adalah seorang penggemar sepeda motor yang bertemu dengan Willy di

Kupang pada bulan September 2000. Saat itu, dia dalam perjalanan keliling dunia untuk mencari dana sosial yang diperuntukkan bagi RfH UK. Dalam proses komunikasi, RfH juga memberikan dukungan dengan mensponsori Willy mengikuti pelatihan *Transport Resource Management* untuk pelayanan kesehatan dan meninjau program yang sedang diimplementasi di Herare, Zimbabwe, sebelum menyusun program di NTT. Dari Herare, Willy kemudian magang untuk keterampilan administrasi di kantor Pusat RfH Inggris. Kegiatan ini ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi program dan penggalangan dana.

Sekembalinya Willy dari mengikuti pelatihan di Herare, Zimbabwe dan kantor pusat RfH Inggris, pada bulan November 2002, ia secara intens berdiskusi dengan sejumlah tokoh. Mereka antara lain, Prof. Dr. Maria Patty Noach (Dosen Undana), Tony Kleden (Wartawan HU Pos Kupang) dan Leonard Simonjuntak (Direktur Yayasan Pikul-saat itu). Diskusi itu kemudian menyepakati pembentukan sebuah yayasan sebagai wadah untuk merealisasikan program dimaksud. Yayasan itu secara resmi berdiri pada tanggal 4 April 2001 dengan nama Yayasan Kesehatan untuk Semua/*Health for All* (YKS/HfA).

Setelah YKS/HfA dibentuk, Willy kemudian melakukan penilaian di Kabupaten Flores Timur dan Lembata untuk menjajaki lokasi operasional program serta lembaga-lembaga yang bisa menjadi mitra kerja. Pilihan jatuh pada daerah Flores Timur. Sementara itu dari hasil penilaian, ditemukan bahwa Dinas Kesehatan, terutama puskesmas-puskesmas telah hadir dan melakukan intervensi yang intensif berkaitan dengan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan dibandingkan dengan intervensi LSM-LSM. Dengan demikian dipilihlah Dinas Kesehatan sebagai mitra kerja YKS/HfA.

Pada tahap awal, YKS bekerja di 5 kecamatan di Flores Timur yakni, Kecamatan Lewolema, Solor Barat, Tanjung Bunga, Adonara Tengah dan Wotan Ulumado.

Dari *Millennium Rider* ke *Motorcycle Outreach*

Tujuh tahun sudah YKS berkiprah di Flores Timur meretas isolasi masyarakat dari akses akan informasi dan pelayanan kesehatan. Semua itu tidak terlepas dari dukungan Simon Millward dari *Millennium Rider*. Dia seorang penggemar sepeda motor yang mengabdikan diri sepenuhnya dalam usaha-usaha penggalangan dana sosial untuk pengembangan program. Dana yang didapat Simon, selain diperuntukan bagi *Riders for Health* Inggris juga diperuntukan bagi YKS.

Bila LSM pada umumnya memiliki lembaga donor, maka tidak demikian bagi YKS. Karena itu, untuk eksisnya program di lapangan, YKS bekerjasama dengan individu dan berbagai organisasi penggemar sepeda motor dunia, di antaranya; FEMA, AMA, RfH, Yamaha Japan, ABATE of Indiana, ABATE of Alaska, South Suburban Chapter of Illinois, In Memory of Captain Ride dan lain-lain.

Pada tahun 2006, kerjasama dengan Simon Millward dari *Millennium Rider* berakhir akibat sebuah kecelakaan yang terjadi antara Mali dan Senegal di Afrika Barat. Kecelakaan naas itu akhirnya merenggut nyawa Simon yang saat itu sedang dalam perjalanan mencari dana sosial.

Karena itu, untuk kelanjutan program, dibentuklah sebuah lembaga untuk mendukung program YKS ke depan yang diberi nama *Motorcycle Outreach* (MOR) yang bermarkas di Inggris. Ide pembentukan lembaga ini mengemuka dalam sebuah pertemuan resmi di Inggris pada awal tahun 2006 yang diprakarsai Willy Balawala yang saat itu menjabat sebagai Direktur YKS, bersama Craig Carey-Clinch, David French,

Barbara, Frank Surgener, Paul Milward, Ian Mutch, Mark Milward, Bob Tomlins, Jane Milward, Robert Rasor, Christina Gesios, Kate dan Barbara Alam. selain itu YKS tetap bekerja sama dengan individu dan berbagai organisasi penggemar sepeda motor di dunia.

Saat ini YKS juga sedang berupaya menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Flores Timur untuk memulai pendanaan program bersama. Sedangkan untuk pencarian dana lokal, bengkel YKS tidak hanya melayani servis sepeda motor YKS, tapi juga dijadikan tempat penjualan suku cadang dan servis bagi umum.

Sejarah MST

Ketika *Riders for Health* mulai memperkenalkan *MST Zero Breakdown* pada awal tahun 90-an, banyak kritik dan keraguan menentang ide ini dengan mengatakan ini adalah ide keliru bila dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui penyediaan transportasi bagi masyarakat Afrika. Namun ketika program ini diimplementasikan, ternyata berhasil meningkatkan kondisi kesehatan 300-400%.

Program MST Kerusakan Minimum pertama dimulai di Lesotho, Afrika bagian selatan pada tahun 1991. Sebanyak 47 sepeda motor dapat digunakan lebih dari 7 tahun tanpa kerusakan parah. Teknik pendekatan yang sama diterapkan di Zimbabwe dan Ghana. Pada tahun 1999 *Riders for Health* memulai sistem MST di Nigeria dan berjalan sesuai rencana meskipun wilayahnya luas dan sering menghadapi kondisi kekacauan sosial dan politik.

Pada tahun 2002, program MST mulai dikembangkan di Flores Timur, NTT oleh Yayasan YKS dan merupakan program pertama yang diimplementasikan di Asia. Program berjalan sukses hingga sekarang.

Saat ini program yang sama telah pula dikembangkan di Argentina oleh seorang dokter ahli beda tulang, Gerardo Sola, setelah mengikti magang di YKS pada tahun 2006 lalu. Sekembalinya ke Argentina ia mendirikan sebuah lembaga yang ia namakan *Pilotos Solidarios* untuk menjalankan program yang sama. (*)

*Penulis adalah Direktur Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS).
Kontak: Jl. Ade Irma II Lor. 1 No. 30 (Depan Platina Komputer) Walikota,
Flores, 0383-21641/HP. 081339306242, email: yks_flores@telkom.net

Belajar Membaca dan Menulis di Sekolah *Lipu*

Oleh Edy Wicaksono

Udara terasa dingin, kabut pun masih menyelimuti alam, kicau burung di pepohonan menambah semarak suasana, sekelompok anak-anak tampak sedang duduk melingkar di atas bebatuan di tepi sungai. Mereka bukan sedang bermain tapi belajar. Hal ini terdengar jelas dari suara-suara mereka yang nyaring mengeja huruf demi huruf. Sekolah mereka memang tak memiliki gedung khusus layaknya sekolah pada umumnya. Sekolah mereka adalah sekolah alam. Sebuah model pendidikan alternatif yang didirikan Yayasan Merah Putih bersama Tau Taa Wana yang tidak tersentuh layanan sekolah formal.

Tau Taa Wana adalah salah satu komunitas adat di Sulawesi Tengah. Wilayah hunian dan aktivitas mereka secara geografis berada di kawasan pedalaman, di tengah hutan tropis dengan rata-rata ketinggian di atas 800 meter dari permukaan laut

atau lebih tepatnya berada di pegunungan Balingara dan meliputi Kabupaten Tojo Una-una, Banggai dan Morowali. Kawasan ini dapat ditempuh selama 18 jam perjalanan dari kota Palu, Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memasuki kampung mereka atau dalam bahasa setempat disebut *lipu*, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki naik turun bukit dan sesekali menyeberangi sungai selama 6-10 jam.

Di Tahun 2008, jumlah komunitas Tau Taa Wana mencapai 2000-an jiwa, mereka tersebar di beberapa unit pemukiman. Karena letaknya yang berada jauh di pedalaman dan tidak memiliki akses transportasi, maka di wilayah ini tidak ada sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Akibatnya, buta aksara merupakan problem utama. Tak heran mereka seringkali menjadi korban pembodohan dari pihak lain, utamanya saat menjual hasil-hasil hutan mereka berupa damar, rotan dan madu ke kota atau kampung sekitarnya. “Karena tak bisa membaca dan berhitung, kami seringkali dibodohi orang luar, apalagi saat menjual rotan dan damar” ujar Apa Wis, Tetua Adat Lipu Ueviau.

Sekolah Dasar hanya ada di desa-desa transimgrasi, yang jaraknya dari kampung terdekat harus dicapai dengan berjalan kaki selama 6-10 jam. Beberapa di antara komunitas ini pernah berupaya mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut, namun perlakuan diskriminatif dan penghinaan membuat mereka mengurungkan niat, selain karena faktor keterbatasan ekonomi.

Tetapi, ketiadaan fasilitas pendidikan dari pemerintah tak membuat mereka putus asa. Berteepatan dengan masuknya Yayasan Merah Putih Palu yang saat itu melakukan penelitian dan pemetaan kawasan hutan, mereka akhirnya sepakat dan bersama-sama membangun sekolah alternatif. Sekolah itu kemudian diberi nama Sekolah Lipu atau sekolah kampung.

Kini, Sekolah Lipu itu telah berkembang di empat kampung, yaitu di Ueviau, Lengkasa, Sabado dan di Kablenga. Jumlah muridnya sekarang sudah lebih 100 orang. Meski pada awalnya sekolah ini dimaksudkan untuk memenuhi hasrat belajar anak-anak yang tak terpenuhi di sekolah formal, namun orang-orang dewasa bahkan para tetua kampung menginginkan agar kepada mereka diberikan sesi khusus untuk belajar baca tulis pada malam hari se usai bekerja di kebun atau hutan. Kini sebagian besar orang dewasa dan orang tua juga sudah mahir baca tulis dan hitung.

Konsep Sekolah Lipu di Wana Bulang adalah sekolah alam. Metode belajarnya sangat informal. Hubungan guru dan murid berlangsung sangat akrab. Maka jangan heran, di Sekolah Lipu, canda, tawa, wajah serius bercampur baur menjadi satu dan silih berganti.

Sensi (16) yang dipercayakan menjadi guru di Lipu Ueviau mengatakan, “Di sini, hubungan kami bukan sekedar guru dan murid, tapi juga sebagai teman bahkan saudara, semua dilandaskan pada kasih sayang pada sesama.”

Di awal pendiriannya proses belajar mengajar di Sekolah Lipu difasilitasi oleh para relawan dari Yayasan Merah Putih. Namun kini anggota komunitas yang sudah mahir baca tulis dan hitung serta memiliki pengetahuan lebih, juga menjadi guru. Pada prinsipnya, semua orang bisa menjadi guru di sekolah lipu. Contohnya, Jiro, seorang pemuda yang mengajarkan cara membuat anyaman dari rotan kepada anak-anak atau Indo Ninjang, sang tabib kampung yang mengajarkan khasiat tumbuhan obat dan cara meramunya.

Meski dengan bekal fasilitas seadanya, proses belajar tetap berlangsung dengan baik. Terkadang bila kehabisan kapur, mereka terpaksa menulis dengan arang atau batu di atas tanah. Sese kali bila tak ada lagi kertas yang tersedia, mereka meng-

gunakan daun untuk menulis. Indo Gebi, guru sekolah lipu di Lengkaesa mengajarkan pada anak-anak agar tak pernah menyerah pada keadaan.

Tak ada gedung khusus untuk belajar, karenanya proses belajar bisa berlangsung di mana saja. Di atas bebatuan, di tepi sungai, di bawah pohon, di tepi kampung atau bahkan di tengah-tengah kebun. “Sekolah ini bisa hadir karena keinginan kuat kami untuk bisa maju, semangat untuk tidak menyerah pada keadaan harus terus menerus dijaga” ujar Indo Gebi.

Materi utama adalah pelajaran baca, tulis dan hitung, ditambah pengetahuan umum dan lingkungan serta tradisi dan kearifan lokal leluhur mereka. Sekolah lipu selain menjadi tempat belajar baca, tulis dan hitung, juga menjadi media transformasi tradisi dan kearifan leluhur kepada generasi mudanya.

Untuk menjaga keberlanjutan sekolah lipu, komunitas Tau Taa Wana Bulang sepakat untuk menggaji para guru, bukan dengan uang seperti layaknya guru di kota, namun dengan cara menyerahkan sebagian hasil panen mereka. Hasil panen tersebut dikumpulkan, sebagian diberikan kepada guru dan selebihnya lagi untuk digunakan membeli kebutuhan sekolah lainnya seperti kapur, buku dan lain-lain.

“Dengan cara seperti ini, para guru yang mengajar di sekolah tak perlu lagi pusing memikirkan kebunnya karena sudah dikerjakan secara bergotong royong oleh warga dan ada hasil panen dari warga, sehingga Sekolah Lipu bisa tetap jalan dan anak kami tetap bisa belajar,” kata Apa Wis.

Guna mendukung aktivitas belajar sekolah lipu, secara swadaya komunitas Tau Taa Wana juga membangun Perpustakaan Lipu dan saat ini sudah ada di tiga desa, yakni di Lengkaesa, Sabado dan Ueviau. Buku koleksi perpustakaan yang kini berjumlah 400-an bersumber dari hasil swadaya

komunitas dan sumbangan pihak-pihak yang peduli pada pendidikan.

Warga bangga dengan kehadiran Sekolah Lipu. Meski fasilitasnya terbatas tapi di sekolah ini anak-anak mereka masih bisa membaca, menulis dan menghitung. “Meski pemerintah tak membangun sekolah untuk kami, tapi kami bisa membangunnya sendiri. Sekarang kami sudah bisa membaca, menulis dan berhitung,” ujar Apa Ntoi, salah satu tetua lipu.

Badri Djawara, aktivis Yayasan Merah Putih berharap agar pemerintah memperhatikan hak warga di daerah terpencil ini atas pendidikan yang lebih baik, termasuk membangun sekolah dan mengirimkan guru yang layak serta fasilitas pendukung lainnya.

* Penulis adalah Edy Wicaksono adalah staf Yayasan Merah Putih, Palu. Kontak: Jl. Tadulako II No 11, Kelurahan Palupi, Sulawesi Tengah, email: ymp_paluu@yahoo.com, 0451-487137

Media Lokal Se-KTI

Gorontalo

Gorontalo Post

Jln. Nani Wartabone 71-A (Eks. Jalan Andalas), Kota Gorontalo

(0435) 827551 - 827552/ (0435) 829603

Email: redaksi_gp@yahoo.com

Maluku

Suara Maluku

Jl. Diponegoro 71 Ambon, Maluku

(0911) 356550/349571

Maluku Utara

Malut Pos

Jl Mess AL (Belakang Polres) Kel. Takoma, Ternate, Maluku Utara

(0921) 327055

Nusa Tenggara Barat

Lombok Pos

Jl. TGH Faisal No. 33 Cakranegara, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat

(0370) 673500 / (0370) 673600

Nusa Tenggara Timur

Timor Ekspres

Jl. R.A. Kartini No. 1 A Kel. Kelapa Lima Kupang 8500

(0380) 821396 / (0380) 820242

Email: timeks_jpnn@yahoo.co.id

Papua

Cendrawasih Pos
Jl. Cendrawasih Entrop Kelapa Dua Jayapura
(0967) 532417 / (0967) 532418 / 536544

Papua Barat

Harian Cahaya Papua
Jl. Pertanian Wosi Dalam Manokwari, Papua Barat
(0986) 213743
cahaya_papua@yahoo.com

Sulawesi Barat

Radar Sulbar
Jl. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju, Sulawesi Barat
(0426) 22138

Sulawesi Selatan

Harian Tribun Timur
Jl. Cenderawasih, Makassar, Sulawesi Selatan
0411 8115555 / 0411 8115522

Sulawesi Tengah

Radar Sulteng
Jl. Yos Sudarso 9, Palu, 94118
(0451) 454306 / 456111

Sulawesi Tenggara

Kendari Pos
Jl. Malik Raya No. 50 Kendari, Sulawesi Tenggara
(0401) 326512 / 3126513

Sulawesi Utara

Manado Pos
Jl. Babe Palar No. 54 Manado
(0431) 855558 / (0431) 855559 / 0431) 857132

Media Nasional

Seputar Indonesia

Menara Kebon Sirih Lt. 22
Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19
Jakarta 10340
Telp. (021) 3926955 Faks. (021) 3927721
redaksi@seputar-indonesia.com

Kompas

Jl. Palmerah Selatan No. 26-28
Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5347710, 5347720, 5347730, 5302200 Fax. (021) 5486085
kompas@kompas.com

Koran Tempo

Kebayoran Center
Blok A11-A15, Mayestik
Jakarta Selatan 12440
Telp. (021) 7255625 Faks. (021) 7255645
koran@tempo.co.id

Media Indonesia

Kompleks Delta Kedoya
Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Telp. (021) 5812088 Faks. (021) 5812105
redaksi@mediaindonesia.co.id

Republika

Jl. Warung Buncit Raya No. 37
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7803747 Faks. (021) 7983623
sekredrep@hotmail.com

Suara Pembaruan

Jl. Dewi Sartika No. 136D
Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 8014077 Faks. (021) 8007262, 8016131
koransp@suarapembaruan.com

Tempo

Gedung Tempo Jl. Proklamasi No. 72
Jakarta
Telp. (021) 3916160 Faks. (021) 3921947
red@tempo.co.id

The Jakarta Post

Jl. Palmerah Selatan No. 15
Jakarta
Telp. (021) 5300476, 5300478, 5306970 Faks. (021) 5306971, 5350050
jktpost2@cbn.net.id; editorial@thejakartapost.com

SCTV

Surya Citra Televisi
Wisma IWI Lt 8 Jl. Perjuangan (jalur lambat Tomang tol)
Kebun Jeruk Jakarta 11530
Telp. (021) 533 0255 Faks. (021) 533 0284

ANTARA

Wisma ANTARA Lt 19-20, Jl Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Telp. (021) 3459173, 3802383, 3812043, 3814268.
Faks. (021) 3840907, 3865577
Email : redaksi@antara.co.id, letter@antara.co.id,
newsroom@antara.co.id

RCTI

(PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, Media Nusantara Citra Group – MNC)
Jalan Raya Perjuangan No. 3 Kebun Jeruk
Jakarta 11000
Telp. (021) 5303540 Faks. (021) 5493852

Global TV

(TVG, PT Global Informasi Bermutu, Media Nusantara Citra Group – MNC)
Wisma Indovision Lantai 17
Jalan Raya Panjang Z/III Green Garden
Jakarta 11520
Telp. (021) 5828555 Faks. (021) 5823636
Includes programmes of MTV Indonesia.

Indosiar (Indosiar Visual Mandiri)

Jalan Damai No. 11
Daan Mogot
Jakarta 11510
Telp. (021) 5672222 Faks. (021) 5652221

Metro TV

Metro TV (PT Media Televisi Indonesia)
Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D
Kedoya, Kebon Jeruk
Jakarta 11520
Telp. (021) 5830 0077 Faks. (021) 581 6365, 581 0044

TPI

Televisi Pendidikan Indonesia
Jl. Pintu II TMII, Pondok Gede Jakarta 13810
Telp. (021) 841 1544 Faks. (021) 841 1544

Stasiun Televisi Swasta INDOSIAR

Jl Damai No. 11 Daan Mogot Jakarta 11510
Wisma Indocement 01/F1 Jl Jend. Sudirman Jakarta 12910
Telp. (021) 5640567, 5655753
Fax. (021) 5223977

DETIK.COM

Aldevco Octagon Building – Lantai 2
Jl. Warung Buncit Raya No.75, Jakarta Selatan 12740
Telp. (021) 794.1177 Faks. (021) 794.4472
Email : redaksi@staff.detik.com

ANtv (ANteve)

ANtv (ANtv / PT Cakrawala Andalas Televisi)
Mulia Center Building 19th Floor
Jalan HR Rasuna Said Kav. X-6 No. 8
Jakarta 12940
Telp. (021) 5222084-86 Faks. (021) 5222087

Trans TV

Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia)
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telp. (021) 794 4240 – 799 0572
Fax. (021) 799 2600

tvOne

(formerly Lativi) (PT Lativi Media Karya)
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Rawa Teratai II No. 2
Jakarta Timur 13260
Telp. (021) 461 3545/461 5044 Faks. (021) 461 6255

